DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abu Daud Budiardjo. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

----------, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bernard L. Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Erlanda Juliansyah Putra. 2015. *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup dalam Presfektif Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2015

Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ibnu Hadjar. 1996. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jenedri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu.* Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Seketariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

----------. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2014. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.

M. Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia,* Jakarta: CV. Rajawali.

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Mahfud MD. 2010. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

----------. 2012. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres.

Muchamad Ali Safa'at. 2011. *Pembubaran Partai Politik: pengaturan dan praktik pembubaran partai politik dalam pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers

Nomensen Sinamo. 2010. *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jala Permata Aksara.

Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Riduan Syahrani. 2009. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum.* Bandung: P.T. Alumni

Roni Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

S.F. Marbun. 2005. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

S.Sumarsono, dkk. 2006.*Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

----------. 2008. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

---------- dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sri Soemantri. 1986.*Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 194*5. Bandung: Alumni Bandung

Tim Penyusun Buku Lima Tahun MK. 2008. *Lima Tahun Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Seketariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Seketariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002- Buku VI Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 200/1960 tentang Pembubaran Partai Masjumi.

Keputusan Presiden Nomor 201/1960 tentang Pembubaran PSI.

Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 tentang Pembubaran partai PKI

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

C. Internet

Pan Mohamad Faiz. *Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review (Bagian I)* dalam http://panmohamadfaiz.com/2009/12/31/mengawal-demokrasi-melalui-constitutional-review-bagian-i/.

Sejarah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam http://www.mahkamahkonstitusi.go.id.

http://ppln.nl/sejarah-pemilu-maklumat-hatta-nomor-x-tahun-1945

LAMPIRAN